



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 827/VIII/2014

I/AGUSTUS 2014



Anggota DPR Periode 2014-2019 Ikuti Pembekalan di Lemhanas



Anggota DPR Periode 2014-2019 Ikuti Pembekalan di Lemhanas



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung membuka secara resmi pembekalan Anggota DPR RI terpilih

Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung membuka secara resmi pembekalan bagi anggota DPR RI yang terpilih dalam Pemilu Legislatif 2014. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional - Lemhanas RI ini diberi nama Harmonisasi Wawasan Kebangsaan.

“Ini harmonisasi, jadi nanti ada proses dialog dan memberikan kesempatan kepada para anggota untuk menyampaikan pandangannya. Kita

perlu berdiskusi karena memang harus dipahami terutama persoalan wawasan kebangsaan ini tidak semua mempunyai pemahaman yang sama,” katanya kepada wartawan di Gedung Lemhanas, Jakarta, Selasa (5/8/14).

Politisi PDIP yang dalam Pileg lalu juga terpilih kembali ini menyebut anggota DPR terutama *incumbent* sudah memiliki pengalaman dalam menyusun sejumlah undang-undang sehingga pemahaman tentang wawasan

kebangsaan sudah teruji. Harapannya menurut Wakil Ketua DPR Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini baik anggota yang baru terpilih maupun yang lama sudah memiliki pemahaman yang sama.

Sementara itu dalam penjelasannya Gubernur Lemhanas Budi Susilo Soepandji menyebut kegiatan pembekalan berlangsung dalam empat gelombang. Pada gelombang pertama diikuti oleh 89 orang anggota DPR yang terpilih

kembali sedangkan tiga gelombang lainnya diikuti oleh anggota yang baru terpilih pada pemilu lalu.

“Dengan kegiatan harmonisasi ini diharapkan dapat dihasilkan pimpinan tingkat nasional yang mempunyai karakter kebangsaan yang tinggi dan

kompeten dibidangnya serta mampu mengimplementasikan paradigma nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” ungkapnya.

Seluruh kegiatan pembekalan yang berlangsung di Lemhanas ini dijad-

walkan berakhir pada tanggal 12 September yang akan datang. Sejumlah penceramah terkemuka akan tampil dalam sesi dialog diantaranya Prof. Dr. Didin S. Damanhuri, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Wamenhan Sjafrie Sjamsuddin dan Dr. Anhar Gonggong. (iky) foto: doc./parle/iw.

Setjen DPR Berbagi Ilmu dengan Setjen Afghanistan

Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI berharap, kunjungan Sekretariat Jenderal *Wolesi Jirga National Assembly of Afghanistan* dapat memberikan manfaat bagi parlemen Afghanistan. Apalagi, kunjungan Setjen Afghanistan ini dalam rangka mempelajari sistem kerja di Setjen DPR RI, salah satunya di bidang riset dan pengolahan data.

Hal itu disampaikan Kepala P3DI Rahayu Setya Wardani, saat menerima 15 pejabat Setjen Afghanistan, di Perpustakaan DPR RI, Gedung Nusantara II, Rabu (6/08) sore. Dalam kesempatan ini, Yayuk, panggilan Rahayu, didampingi oleh beberapa peneliti, pustakawan, dan staf P3DI.

“Dalam pertemuan ini, kami dari jajaran P3DI menyampaikan materi mengenai kegiatan yang ada di lingkungan P3DI. Pertama, mengenai perpustakaan, karena tujuan utama dari Setjen Afghanistan itu ingin belajar mengenai perpustakaan DPR. Kemudian soal kajian atau riset yang ada di DPR, dalam memberikan dukungan keahlian terutama hasil-hasil kajian atau penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para peneliti untuk Parlemen,” jelas Yayuk.

Dalam kesempatan itu juga, dibahas pula mengenai arsip dan dokumentasi, yang diperlukan oleh Anggota DPR dalam melaksanakan tugasnya di Parlemen. Sehingga, dokumen atau risalah-risalah, dapat disiapkan ketika rapat-rapat, misalnya rapat pembahasan RUU ataupun rapat-rapat lainnya.



Kapus. P3DI Setjen DPR RI Rahayu Setya Wardani memberikan cinderamata kepada Deputy Secretary General of *Wolesi Jirga Afghanistan*. Mortaza Rahimi

“Mungkin saja Setjen DPR ini menjadi *role model* bagi Setjen Afghanistan. Karena dengan jumlah staf yang sedikit, kami melayani 560 Anggota DPR. Selain itu, perpustakaan juga memiliki koleksi buku dalam beberapa bahasa, bahkan ada buku dari abad ke-17. Itu dapat menjadi percontohan untuk mereka, bahwa mereka juga akan mengoleksi buku-buku sebanyak mungkin untuk kebutuhan anggotanya,” tambah Yayuk.

Yayuk mengakui, dalam pertemuan ini, P3DI Setjen DPR lebih berperan dalam memberikan penjelasan dibanding Setjen Afghanistan. Sehingga, P3DI belum bisa mengetahui bagaima-

na sistem kerja di Setjen Afghanistan.

“Memang kebetulan P3DI lebih banyak memberikan informasi daripada Setjen Afghanistan. Mereka juga tidak memperkenalkan atau menyampaikan apa yang mereka lakukan di kesetjenan mereka. Tetapi dengan adanya pertemuan seperti ini kita juga akan belajar dari Afghanistan, mungkin lewat *online*,” tutup Yayuk.

Pertemuan diakhiri dengan pertukaran cinderamata dari kedua belah pihak dan foto bersama seluruh delegasi bersama staf P3DI Setjen DPR RI. (sf) foto: odjie/parle/iw.

Elpiji 3 Kg Langka, Komisi VII DPR Desak Pemerintah Susun Standar Distribusi



Wakil Ketua Komisi VII DPR Daryatmo saat meninjau stok elpiji 3 Kg di Semarang

Sempat terjadi Kelangkaan elpiji 3 kg saat Lebaran 2014 lalu, Komisi VII DPR mendesak Pertamina segera menyusun bentuk standar pemasaran dan pendistribusian elpiji untuk 3 kg.

“Saat kunjungan kerja ke Semarang, DPR memperoleh temuan bahwa soal pendistribusian elpiji 3 kg ada mata rantai yang membuat terjadinya kelangkaan maupun ketidak lancaran pendistribusian,” terang Wakil Ketua Komisi VII DPR Daryatmo.

Menurut Daryatmo, Komisi VII DPR mengusulkan perlu adanya perbandingan ketersediaan, dan pendistribusian elpiji 3 kg dengan BBM Subsidi. Pasalnya BBM Subsidi dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat. “Kemungkinan harga tidak wajar itu ada di unsur Pertamina, agen, pengecer maupun pangkalan,” ujarnya.

Dia menambahkan, hal itu membuat terjadinya pembengkakan harga maupun terjadi ketidaklancaran ketersediaan. “walaupun ada formulanya kita ingin ada perlakuan sama antara PSO berapapun harga yang ditetapkan subsidi dengan margin tetap bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat dengan harga sama, dan tanpa potensi yang dipermainkan oleh kelompok kepentingan,” tegasnya.

Berdasarkan pantauan pasca perayaan Lebaran, tabung gas LPG ukuran 3 kilogram di sejumlah wilayah Subang selatan langka. Diduga kelangkaan tersebut akibat terhambatnya pengiriman gas elpiji akibat kemacetan arus balik. Kelangkaan elpiji 3 kg terjadi di Kecamatan Cisalak dan Tanjungsiang dan sudah terjadi selama kurang lebih dua hari. (si) *foto:sugeng/parle/iw.*

Integritas dan Intelegensi Mutlak Dimiliki Anggota Dewan

Ketua BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) DPR RI yang sekaligus sebagai anggota Komisi VIII DPR, Sumarjati Arjoso berharap agar anggota parlemen periode mendatang selain harus memiliki integritas yang tinggi juga memiliki intelegensi atau kemampuan berpikir yang tinggi. Hal tersebut menyangkut tugas dan fungsinya sebagai anggota parlemen yang notabene sebagai wakil rakyat.

“Jadi begini, parle itu artinya bicara, sebagai anggota parlemen kita wajib berbicara, berbicara untuk menyampaikan aspirasi atau kebutuhan masyarakat. Dimanapun kita berada harus menyampaikan aspirasi masyarakat didasari oleh pemahaman pada permasalahan yang ada. Tentunya kita berharap anggota parlemen, meski persyaratan tentang intelegensi, intelektualitas atau kemampuan berpikir tidak ada (hanya minimal lulusan SMA), tetapi sebagai seorang anggota



Ketua BAKN DPR Sumarjati Arjoso

parlemen tetap harus paham segala hal, paling tidak sesuai komisinya masing-masing,” jelas Sumarjati kepada Parlemen beberapa waktu lalu.

Ditambahkan politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini, tidak jarang DPR juga melakukan *fit and proper test* untuk jabatan tertentu, oleh karena sejatinya

anggota parlemen harus lebih pintar dari yang ditest.

Sumarjati memandang positif pembekalan yang diberikan DPR kepada para caleg terpilih, namun menurutnya tidak bersifat detail pada sebuah permasalahan tertentu. Hanya sebatas penyamaan persepsi dan hal-hal teknis lain seperti bagaimana cara memimpin dan berbicara.

Kepada tenaga ahli sekalipun, anggota dewan tidak seharusnya menyerahkan seutuhnya tugas dan tanggung jawabnya. Menurut Sumarjati, anggota dewan harus tetap memberikan arahan kepada Tenaga Ahli (TA) nya apa yang harus dibuat atau apa yang harus dikerjakan dari tugas-tugasnya tersebut. Disinilah tetap diperlukannya intelektualitas dan kemampuan berfikir dari anggota dewan dalam memberikan arahan kepada TA nya tersebut. (Ayu) *foto: iwan armanias/parle.*

Pembangunan Kilang Minyak Perlu Kesepakatan Politik

Wakil Ketua Komisi VII DPR Daryatmo mengatakan, pembangunan kilang minyak di Indonesia dapat terlaksana apabila ada keputusan politik bersama antara pemerintah dan DPR RI.

“Kita sangat ironis apabila *crude* minyak kita dibawa keluar untuk diolah kemudian dijual kembali di Indonesia,” terangnya kepada Parlemen baru-baru ini.

Dia mengakui pembangunan kilang memang margin keuntungannya tidak terlalu besar dibandingkan dengan trading. “Kilang kita tidak pernah bertambah dari dulu selain itu kita juga perlu revitalisasi kilang dengan melakukan peningkatan kemampuan kilang termasuk jenis produknya, jadi kalau itu bisa ditingkatkan kemampuan kilangnya bahkan lebih dari premium bilangan oktan 88 tentunya akan lebih baik,” katanya.

Menurutnya, investasi pembangunan kilang serupa dengan pembangunan smelte, artinya kita berusaha mencari nilai lebih dari suatu produk. “Negara juga harus memposisikan atau kesungguhannya dengan menjamin pembangunan kilang itu,” ujarnya.

Belum lama ini, Pemerintah telah melakukan rapat Koor-



Wakil Ketua Komisi VII DPR Daryatmo

dinasi dimana keputusannya yaitu berencana mempercepat pembangunan kilang minyak. Pasalnya, selama ini proses pembangunan *mandek* karena investor memiliki keinginan yang berbeda dan spesifik. (si) foto: iwan armanias/parle.

Pembekalan Anggota DPR Periode 2014-2019 Dinilai Positif

Kegiatan pembekalan bagi anggota DPR RI yang terpilih pada Pemilu Legislatif 2014 dinilai dapat memberikan masukan positif bagi wakil rakyat tentang tantangan berbangsa dan bernegara di masa datang. Pemahaman terhadap masalah ini diharapkan tercermin pada keputusan dan produk legislasi yang akan diselesaikan.

“Saya anggap ini satu langkah cukup bagus untuk bisa membentuk karakter anggota DPR yang akan bertugas lima tahun ke depan. Wawasan Kebangsaan itu sangat penting, menciptakan nasionalisme bagi masing-masing anggota sehingga dapat menghasilkan keputusan dan produk UU yang lebih baik bagi bangsa,” kata anggota Komisi V DPR Sadarestuwati disela kegiatan di Gedung Lemhanas, Jakarta, Selasa (5/8/14).



Anggota Komisi V DPR Sadarestuwati

Politisi FPDIP yang kembali mendapat amanah mewakili daerah pemilihan Jatim VIII mengaku sejumlah materi yang disajikan bukanlah hal

baru baginya. Sebagai anggota MPR ia juga melakukan tugas yang sama pada saat menyosialisasikan Empat Pilar ke sejumlah daerah. “Kita harap nanti DPR dan Lemhanas sebagai pelaksana bisa bertukar pengalaman dan saling melengkapi,” ujar dia.

Bicara pada kesempatan berbeda anggota Komisi I Hidayat Nurwahid menyebut pembekalan bagi anggota DPR ini disepakati saat melaksanakan rapat dengan Lemhanas sebagai mitra kerja. Ia berharap hasil kajian terbaru Lemhanas tentang permasalahan berbangsa, bernegara dapat dipaparkan dalam acara ini.

Mantan Ketua MPR ini menyampaikan satu catatan kepada Lemhanas terkait penyelenggaraan kali ini. “Kita di-reminding untuk datang pada jam 07.00 WIB. Ketika sampai disini

lampu ruangan saja belum menyala,” ungkapnya. Ia menekankan kegiatan kali ini dalam konteks sesama lembaga negara, menghadirkan para negarawan yang saling menghormati, bukan dalam posisi yang satu mengatur, yang lain diatur.

Pembekalan yang diberi nama Harmonisasi Wawasan Kebangsaan ini dilaksanakan empat gelombang. Khusus gelombang pertama untuk anggota DPR yang terpilih kembali pada Pileg lalu. Sejumlah materi akan dibahas dalam pertemuan

ini diantaranya tentang Dinamika Wawasan Kebangsaan, Pemberdayaan Wilayah dan Pertahanan Negara dalam Perspektif Geopolitik dan Geostrategi Indonesia. (iky)/foto:andri/parle/iw.

Butuh Legitimasi Kuat Untuk Pimpin Indonesia



Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa saat menerima relawan Prabowo-Hatta

Untuk memimpin bangsa yang besar seperti Indonesia dibutuhkan legitimasi hukum yang kuat. Tanpa legitimasi kuat, tak ada yang bisa dilakukan oleh siapapun yang terpilih menjadi Presiden Indonesia.

Demikian dikemukakan Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa saat berorasi di hadapan para relawan Prabowo-Hatta, Rabu (6/8). Para relawan mendatangi Gedung DPR dan berorasi di depan pintu gerbang DPR untuk menyampaikan aspirasi soal kecurangan dalam Pilpres 9

Juli lalu. Agun berorasi di atas sebuah mobil bersama Ali Mochtar Ngabalin.

“Aspirasi saudara akan kami perlakukan seadil-adilnya demi demokrasi yang bermartabat,” kata Agun, seraya disambut gemuruh tepuk tangan para demonstran. Komisi II yang membidangi politik dalam negeri tidak menghendaki pembangunan demokrasi dengan cara-cara kekerasan dan inkonstitusional.

Selama ini, kata Agun, Komisi II DPR-lah yang mengawasi pelaksanaan Pemilu dan Pilpres. Dan sangat tepat bila para relawan mengajukan aspirasinya ke Komisi II. “Komisi II tidak pernah menempuh cara-cara yang inkonstitusional dan tidak sesuai dengan tata tertib di DPR,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Sementara Ali Mochtar Ngabalin sebelumnya juga meminta agar DPR mau peduli merespon aspirasi para relawan Prabowo-Hatta. “Kami minta pertanggungjawaban KPU, karena dari data yang kami miliki, kecurangan dalam Pilpres sangat terstruktur dan masif. Untuk itulah, kami juga mengadukan masalah ini ke DPR,” ungkap Ali. (mh,pi) foto:andri/parle/iw.

Kabupaten Kepulauan Kundur Penuhi Syarat Pemekaran

Satu lagi wilayah akan segera dimekarkan menjadi kabupaten. Wilayah Kepulauan Kundur yang berada di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sudah memenuhi syarat perundang-undangan untuk menjadi kabupaten sendiri.

Demikian ditegaskan Ketua Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPR RI, Arif Wibowo usai menggelar pertemuan dengan Gubernur dan para staf Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) di Dompok, Kepri, Selasa (5/8). Menurut Arif, semua persyaratan pembentukan

Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo





kabupaten telah dipenuhi.

Bahkan, Presiden melalui Kemendagri telah memberi lampu hijau agar sebelum masa tugas dewan periode 2009-2014 ini berakhir, usulan pemekaran tersebut telah disahkan melalui Rapat Paripurna DPR RI. "Pembentukan dan Pengesahan Kabupaten Kepulauan Kundur perlu dipercepat. Karena sudah sangat mendukung serta semuanya sudah terpenuhi apalagi ditunjang dengan letak geografis wilayahnya dekat dengan negara tetangga," ungkap Arif.

Khatibul Umam Wiranu, Wakil Ketua Komisi II DPR yang juga ikut dalam rombongan Tim Kunker, menyatakan, di sisa waktu yang tinggal 1,5 bulan lagi, Komisi II tetap akan mengesahkan usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk disahkan dalam Rapat Paripurna DPR. Tanggal 15 Agustus ini DPR akan

mengawali Pembukaan Masa Sidang I dengan agenda mendengarkan Pidato Presiden RI Pengantar Nota Keuangan RAPBN 2015.

Sementara itu, Anggota Tim Kunker lainnya Abdul Malik, berpendapat, usulan pemekaran DOB Kabupaten Kepulauan Kundur sudah memenuhi syarat-syarat legalistik dalam PP No. 78/2007. Jadi, tak perlu menunggu terlalu lama. Sebelum berakhirnya masa jabatan periode ini, Kepulauan Kundur sudah disahkan menjadi kabupaten.

"Kundur ini daerahnya terbuka. Berada pada dua sisi daerah perbatasan. Pertama, sebagai daerah perbatasan Prov. Kepri dengan Prov. Riau. Kedua, sebagai daerah perbatasan dengan negara Singapura. Oleh karena itu, masyarakat Kundur menaruh harapan besar pada DPR RI segera mengesahkan

kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Karimun ini. Bahkan, segala daya upaya telah dilakukan masyarakat, hingga akhirnya penentuan pengesahan tinggal ketok palu DPR," tegasnya.

Menurut Malik, perjuangan masyarakat di Kepulauan Kundur untuk menjadikan wilayahnya sebagai DOB, telah dimulai sejak tahun 2010. Karena semua syarat telah dipenuhi, tentu tinggal menunggu pengesahannya saja.

Kunker Komisi II DPR RI ini dilakukan di masa reses Persidangan IV Tahun Sidang 2013-2014. Anggota Tim Kunker yang ikut serta berjumlah 21 orang. Selama di Kepri, Tim Kunker ini bertemu dengan Gubernur Kepri H. Muhammad Sani dan seluruh staf SKPD di kantor Gubernur. (hindra). foto:eka hindra/parole/iw.

Radikalisme Perlu Dicegah Sejak Dini

Pemerintah diminta bersikap tegas terhadap beredarnya video ajakan untuk bergabung dengan gerakan radikal ISIS (*Iraq Syria of Islamic State*). Membiarkan kehadiran ajaran radikal dinilai hanya mendatangkan kerugian bagi bangsa ini.

"Radikalisme itu perlu dicegah sejak dini tidak boleh dibiarkan sebab kalau dibiarkan kerugian kita untuk menangani itu cukup berat," kata Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai gerakan ISIS di Jakarta, Selasa (5/8/14).

Politisi FPDIP ini mendukung upaya pemerintah untuk segera memblokir tayangan video ISIS karena dinilai dapat membahayakan negara. Ia mengakui persoalan radikalisme muncul karena persoalan ekonomi yang tidak merata. Menurutnya pemerintah perlu memperbaiki kondisi ini.

Bicara pada kesempatan berbeda anggota Komisi III Martin Hutabarat menekankan radikalisme adalah tantangan laten yang bisa mengganggu persatuan dan kesatuan terutama NKRI. Aparat perlu melakukan penangkalan dan tindakan penegakan hukum.

"Penangkalan itu jangan sampai ideologi ini bisa membesar masuk ke Indonesia. Aparat seperti BNPT perlu melakukan deradikalisme kepada mantan terorisme juga kepada anak muda yang berpotensi terpengaruh ideologi ISIS ini," tegasnya.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menyayangkan munculnya perbedaan antara Menkumham dan Menkominfo menyikapi video ajakan bergabung dengan ISIS. "Seharusnya



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung

anggota kabinet satu bahasa. Jangan sampai ideologi ini begitu masif masuknya sehingga kita kesulitan," demikian Martin. (iky) foto: andri/parole/iw.

Hidayat Nurwahid : ISIS Tidak Punya Tempat di Indonesia



Anggota Komisi I DPR Hidayat Nurwahid

Bangsa Indonesia sudah membulatkan tekad untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana telah diputuskan dalam TAP MPR no.18 tahun 1998. Oleh sebab itu Gerakan ISIS (*Iraq Syria of Islamic State*) yang berkembang di Timur Tengah jelas tidak mempunyai tempat di Indonesia.

“Kalau melihat pada apa itu gerakan ISIS, sesungguhnya memang tidak ketemu dengan Pancasila dan dengan sistem hukum yang berlaku. Jadi jelas ISIS tidak punya tempat di sini,” kata anggota Komisi I DPR RI Hidayat Nurwahid di

Jakarta, Selasa (5/8/14).

Ia mengimbau pada para aktivis yang mempunyai ketertarikan untuk bergabung dengan kelompok ini mengurungkan niatnya. Semangat jihad yang diserukan ISIS menurutnya lebih baik disalurkan untuk membuat negeri ini lebih baik seperti berjihad dibidang politik, pendidikan, sosial yang menurutnya terbuka lebar.

Mantan Ketua MPR ini menambahkan kalau membaca sepek terjang ISIS di Timur Tengah semakin kuat indikasi gerakan ini bentukan pihak intelejen dengan kepentingan tertentu. Gerakan yang merupakan pecahan Al Qaida ini mengaku membawa kepentingan Islam Sunni menurutnya sangat tidak relevan. Apalagi ISIS tidak pernah mengancam Israel atau membela Gaza yang tertindas.

“Sesungguhnya Islam Sunni itu paling moderat, rupanya ada pihak yang tidak senang kalau Islam moderat itu dominan. Gerakan ISIS sebagai bentukan intelejen asing kemudian mendapat pembenaran ketika ISIS tidak pernah mempermasalahkan Israel, tidak juga membela Gaza dan Palestina. Tidak pernah kedengaran mereka akan mengirimkan tentara untuk membela Gaza, padahal tetangganya,” tandasnya.

Hidayat yang juga Ketua Fraksi PKS DPR ini berharap publik cerdas dalam memilah informasi sehingga tidak gegabah dalam membuat keputusan untuk berbaiat dengan organisasi ini. Ia meminta pemerintah segera berdialog dengan warga masyarakat yang sempat mendeglarasikan diri sebagai pendukung ISIS disejumlah daerah di tanah air. *(iky)/foto:iwan armanias/parle/iw.*

Operasi Pasar Gula Rafinasi Harus Rutin

Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali membuka pintu impor gula rafinasi. Kebijakan ini telah menimbulkan keresahan para petani tebu. Pasalnya, gula rafinasi yang merembes ke pasar tradisional saja belum semuanya terserap. Tentu ini sangat mengancam produksi gula tebu para petani di Tanah Air.

Anggota Komisi VI DPR RI Ferrari Roemawi (F-PD) yang dihubungi lewat telepon, Selasa (5/8), berpendapat, sepanjang kuota impor gula rafinasi tersebut tidak merembes ke



Anggota Komisi VI DPR Ferrari Roemawi

pasar tradisional, kebijakan impor itu tidak masalah. Selama ini yang jadi masalah, para importir gula rafinasi yang sesungguhnya ditujukan untuk konsumsi industri, malah menyelewengkan kuota impornya ke pasar tradisional.

Rembesan gula rafinasi beberapa waktu lalu saja belum terserap habis di pasar tradisional. “Kebijakan ini perlu kita evaluasi. Kalau memang tepat ditujukan untuk industri, tidak ada masalah. Persoalannya ini rembes ke pasar tradisional. Nah, rembesan ini yang kita evaluasi,” terang Ferrari.

Pemerintah diimbau Ferrari agar menindak tegas para importir nakal yang merusak harga gula konsumsi dengan

gula industri. “Yang penting sekarang, pemerintah kendalikan peredaran gula rafinasi. Semuanya harus sesuai kuota dan jangan mengacaukan gula konsumsi.” Untuk itu, perlu ada operasi pasar yang rutin dilakukan, baik di pasar tradisional maupun pasar modern.

Masalah ini, sambung Ferrari, sudah menjadi masalah klasik di Tanah Air. Selanjutnya, kasus rembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi atau tradisional jangan pernah terulang lagi. Harus ada sokterapi yang diberikan kepada para importir yang sengaja menyalahi izin impornya. (mh)/foto: iwan armanias/parle/iw.

Ketua DPR Gelar Open House Lebaran

Ketua DPR RI Marzuki Alie menerima kehadiran warga masyarakat untuk merayakan Idul Fitri 1435 Hijriah sekaligus saling bersilaturahmi di rumah dinas Komplek Widya Chandra, Jakarta. Ia menyebut Idul Fitri kali ini memiliki makna tersendiri karena pada saat puasa Ramadan, bangsa ini berhasil melewati proses pemilu dengan damai.

“Saya bersyukur Pemili Presiden meski panas tapi karena di bulan Ramadhan keadaan menjadi berbalik dari kebiasaan sehari-hari, Ramadhan marahnya hilang, tadinya tidak jujur jadinya jujur. Ini berkah bagi kita dan hari ini kita kembali ke fitrah,” katanya disela-sela acara *open house*, Senin (28/7/14).

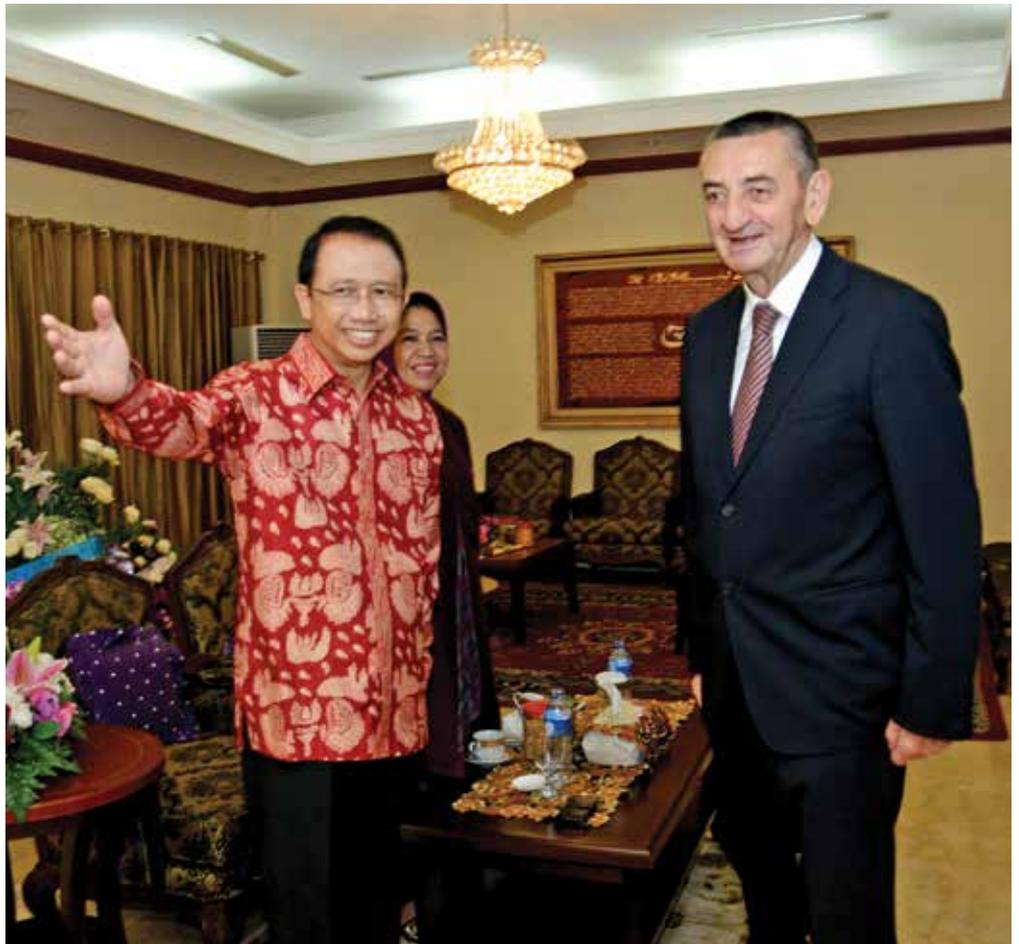
Acara silaturahmi ini dihadiri oleh sejumlah anggota DPR, pejabat pemerintah, pengurus partai politik, pejabat di lingkup Sekretariat Jenderal DPR dan masyarakat umum yang datang dari sejumlah wilayah di Jakarta dan sekitarnya.

Ia secara khusus juga memberikan catatan tentang kondisi Jakarta pasca lebaran yang selalu dipenuhi oleh para pendatang baru dari daerah. Marzuki berharap dengan disahkannya UU Desa oleh DPR beberapa waktu lalu arus urbanisasi ini sedikit demi sedikit akan terkikis dengan sendirinya.

“UU Desa mengamanatkan anggaran yang cukup untuk membangun desa. Jadi kalau itu berhasil maka masyarakat

desa tidak perlu lagi ke kota, walaupun mau ke Jakarta bukan lagi untuk mencari uang tapi jalan-jalan, belanja,” tuturnya.

Politisi Partai Demokrat ini menggambarkan pada satu saat nanti apabila pembangunan di desa sudah berjalan lancar, urbanisasi ditekan, maka arus mudik lebaran dari Jakarta atau kota-kota besar lain juga akan menurun, lebih lancar dan aman. (andri/iky)/foto: andri/parle/iw.



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menerima ucapan Idul Fitri dari Dubes negara sahabat



OPEN HOUSE KETUA DPR RI MARZUKI ALIE

SEMARAK HALAL BI HALAL
IDUL FITRI 1435 H







**SEMARAK HALAL BI HALAL
IDUL FITRI 1435 H**

SILATURRAHIM KELUARGA BESAR SETJEN DPR RI





Perlu Upaya Serius Tekan Kecelakaan Motor Saat Mudik



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat diwawancara wartawan

Ketua DPR RI Marzuki Alie menyampaikan keprihatinan atas masih tingginya korban kecelakaan pengendara sepeda motor pada arus mudik lebaran kali ini. Ia meminta pemerintah lebih serius mencari solusi agar kondisi ini dapat diperbaiki dan korban jiwa dapat ditekan.

“Pemerintah belum mampu memenuhi transportasi mudik yang memadai, arus mudik masih tinggi sehingga

suka tidak suka pemudik menggunakan kendaraan roda dua, ini riskan. Banyak sekali terjadi kecelakaan hampir setiap tahun artinya kedepan harus lebih diantisipasi,” ujarnya kepada wartawan disela kegiatan open house di Komplek Widya Chandra, Jakarta, Senin (28/7/14).

Ia meminta pemerintah meningkatkan pelayanan transportasi gratis, untuk mengangkut kendaraan roda dua para pemudik saat mudik lebaran, pada

tahun-tahun mendatang. Antisipasi lain misalnya dengan menyediakan jalur khusus bagi pengendara sepeda motor baik di dalam maupun di luar kota agar angka kecelakaan dapat dikurangi.

Pada bagian lain Marzuki menyampaikan apresiasi atas kerja keras aparat pemerintah dalam menyelenggarakan proses arus mudik tahun ini. Secara umum dibandingkan tahun sebelumnya angka kecelakaan lalu lintas pada mudik lebaran tahun ini menurun.

Sementara itu bicara pada kesempatan yang sama Wakil Ketua Komisi V Michael Watimena menjelaskan DPR telah memberikan dukungan kepada pemerintah terutama dari sisi anggaran agar kegiatan tahunan ini berjalan lancar. Namun upaya mewujudkan zero accident masih jauh dari kenyataan.

Komisi Perhubungan yang dipimpinnya juga intens melakukan pemantauan arus mudik kali ini. Data yang berhasil dihimpun pada Posko Angkutan Terpadu Nasional 2014 Kemenhub dan Pusat Data Korlantas Polri sampai tanggal 31 Juli telah terjadi 2003 kecelakaan lalu lintas. Korban meninggal dunia 429 jiwa, luka berat 704 dan luka ringan 2595 orang. (andri/iky)/foto:andri/parle/iw.

PP BPJS Ketenagakerjaan Harus Segera Diterbitkan

Peraturan Pemerintah (PP) atau Perpres sebagai aturan turunan dari pemberlakuan BPJS Ketenagakerjaan hingga kini belum diterbitkan pemerintah. Padahal, banyak hal krusial yang perlu segera diatur, terutama menyangkut besarnya iuran dan Program Bantuan Iuran (PBI) untuk para pesertanya.

BPJS Ketenagakerjaan yang akan diberlakukan pada 1 Juli 2015 itu, masih merumuskan besaran iuran bagi para pesertanya. Dengan adanya aturan turunan tersebut diharapkan ada ke-



Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati

pastian hukum bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iuran tersebut nantinya bisa dimanfaatkan peserta untuk dana pensiun, hari tua, dan kematian.

“Meningat alotnya pembicaraan soal besaran program bantuan iuran yang ditetapkan pemerintah, maka perlu sekali desakkan kepada pemerintah agar PP atau Perpres segera dibuat untuk menentukan besarnya iuran bagi program-program yang diadakan oleh BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati,



saat dihubungi Senin (4/8).

Selama ini, kata Okky, BPJS Ketenagakerjaan baru disosialisasikan lewat televisi swasta yang jangkauan-pemirsanya sangat terbatas. Sosialisasi harus dilakukan secara luas dan masif. Berkaca pada sosialisasi BPJS Kesehatan yang tidak optimal, maka

diharapkan program BPJS Ketenagakerjaan bisa lebih sukses dengan sosialisasi yang seluas-luasnya.

Namun demikian, politisi PPP tersebut menilai, BPJS Ketenagakerjaan lebih siap daripada BPJS Kesehatan. “Jamsostek yang bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan tam-

paknya lebih siap untuk melakukan hal itu bila dibandingkan bagaimana PT. Askes dan Kementerian Kesehatan mempersiapkan diri untuk pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan,” nilai Okky. (mh)/foto:odjie/parle/iw.

Membersihkan Hati Kembali Fitri



Suasana Halal Bihalal pegawai Setjen DPR RI

Usai melewati fase Ramadan dan Idul Fitri tentu menjadi momentum berharga untuk membersihkan hati, kembali ke fitri. Inilah momentum penting bagi umat Islam, tak terkecuali bagi seluruh pegawai Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.

Senin pagi (4/8), aula Gedung Nusantara dipenuhi para pegawai Setjen DPR. Senyum ceria dan saling bercengkrama mewarnai pertemuan halal bil halal.

Berjabat tangan dan saling bertukar cerita setelah libur lebaran, menjadikan suasana begitu hangat dan akrab.

Sekjen DPR RI Winantuningtyas-titi dalam sambutannya menyampaikan bahwa setelah membersihkan hati dan kembali ke fitri, diharapkan semua pegawai kembali memberikan kontribusi bagi lembaga DPR ini. Mulai Agustus ini agenda di DPR begitu banyak, sehingga membutuhkan perhatian para

pegawai untuk terus berkontribusi menyukseskan agenda-agenda DPR.

“Kita bisa kerjasama berkontribusi lebih besar lagi untuk lembaga ini, terlebih kita akan menyambut banyak kegiatan. Selain Pidato Presiden, mulai minggu depan akan melakukan orientasi pemantapan untuk anggota yang lama melanjutkan tugas dan juga anggota yang baru. kemudian akan terus berlanjut sampai nanti pelantikan presiden,” ungkap Win.

Momentum halal bil halal ini juga sekaligus merefleksikan tragedi kemanusiaan di Palestina. Serangan militer tentara Israel telah menenggelamkan warga sipil di Palestina. Win dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh pegawai untuk mendoakan warga Palestina dan kaum muslim di beberapa negara sahabat lainnya agar selamat dari bencana konflik bersenjata.

“Saya ingin mendoakan kaum muslimin saudara-saudara kita di Palestina, Afganistan, Libia, dan lain-lain yang sekarang sedang mengalami konflik. Di Palestina korbannya sudah cukup banyak. Kita doakan semoga Allah memberikan kekuatan dan konflik ini cepat selesai,” harap Win. (mh) foto:odjie/parle/iw.

DPR Harapkan Jepang Perbanyak Investasi di Indonesia

Ketua Badan Anggaran DPR RI Ahmadi Noor Supit berharap Jepang dapat memperbanyak investasinya di Indonesia. Apalagi, hubungan Indonesia dengan Jepang sudah berlangsung sudah lama, tak kurang dari 30 tahun.

“Kita berharap investasi Jepang di Indonesia semakin

banyak. Kalau Parlemen Jepang dapat meyakinkan pemerintahnya, begitu juga Parlemen Indonesia, tentu investasi ini dapat terus berlangsung. Lagipula ini untuk kepentingan Indonesia yang lebih baik,” jelas Ahmadi usai pertemuan dengan Komisi Anggaran Parlemen Jepang di Gedung Nusantara III, Kamis (24/07).



Ketua Badan Anggaran DPR RI Ahmadi Noor Supit

Dalam kesempatan tersebut, Ahmadi juga mempertanyakan bagaimana Parlemen Jepang membuat kebijakan terkait anggaran negaranya. Karena Jepang menganut sistem parlementer, sehingga proses penganggarannya tentu saja berbeda dengan Indonesia.

“Indonesia dan Jepang memang agak berbeda, karena Jepang menganut sistem parlementer. Tentu berbeda dengan Indonesia,” imbuh Ahmadi.

Politisi Golkar ini menambahkan, dalam pertemuan juga dibahas kerjasama di beberapa bidang, seperti pertanian dan sumber daya energi. Apalagi, sampai saat ini posisi Indonesia yang terus mengekspor LNG ke Jepang.

“Jepang menganggap Indonesia mempunyai peran strategis. Sehingga perlu memperlambat kerjasama. Mereka menawarkan kerjasama di bidang pertanian dan energi,” imbuh Ahmadi.

Soal energi, tambah Ahmadi, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap hubungan energi kedua negara. Saat ini, Jepang hanya mengimpor LNG saja, tidak ada nilai lebih yang didapat.

“Oleh karena itu ke depannya ada evaluasi, sehingga mendapatkan *value added* yang lebih baik bagi Indonesia. Tentu ini sangat bagus. Mereka akan menyampaikan hal ini kepada Perdana Menteri mereka. Kita juga akan menyampaikan hal ini kepada presiden baru, sehingga kerjasama ini dapat berkelanjutan,” tutup Politisi dari Kalimantan Selatan ini. (sf) foto:odjie/parle/iw.

Distribusi Kebutuhan Pokok Lancar

Distribusi kebutuhan pokok jelang dan pasca-Idul Fitri dinilai lancar, tak ada kendala yang berarti. Di pasar-pasar tradisional pun tidak ditemukan kelangkaan atas komoditi kebutuhan pokok masyarakat.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Refrizal (F-PKS) beberapa waktu lalu di Jakarta. “Setahu saya kebutuhan pokok kita tidak ada kendala. Di lapangan tidak ada masalah, tidak ada kelangkaan. Kalau kita pergi ke pasar dipastikan tidak ada kelangkaan,” ungkap Refrizal.

Kalau pun ada masalah kenaikan harga, ujar Refrizal, itu berarti ada pemain yang sengaja memainkan harga. Masyarakat sudah dilindungi oleh UU No.7/2014 tentang Perdagangan. Pemerintah bisa melakukan intervensi untuk menstabilkan harga. “Itu modal besar bagi pemerintah agar bisa mengatasi harga-harga. Untuk sembilan kebutuhan pokok dan barang yang dianggap penting lainnya, pemerintah bisa melakukan intervensi,” terang Refrizal lagi.

UU Perdagangan memberi kewenangan penuh bagi pemerintah untuk mampu mengendalikan harga bahan-bahan kebutuhan pokok. Pengecer di pasar tidak mungkin menaikkan harga, selama tidak ada distributor yang bermain. “Saya menyampaikan kepada pemerintah penggunaan UU No.7/2014 yang baru saja kita miliki itu untuk mengatasi mekanisme harga dan kelangkaan,” tandas Refrizal. (mh) foto:odjie/parle/iw.



Anggota Komisi VI DPR Refrizal

Masa Reses, Panja RUU Hak Cipta Tetap Rapat

Panitia Kerja (Panja) RUU Hak Cipta berupaya mengejar target penyelesaian produk legislasi yang diharapkan tuntas pada masa sidang yang akan datang. Untuk memenuhi target tersebut serangkaian rapat dilaksanakan pada masa reses.

“Kita ingin agar produk legislasi ini bisa selesai pada waktunya sebagai bentuk tanggung jawab walaupun sebagian besar anggota panja tidak terpilih kembali dalam pemilu lalu tapi kami berkomitmen akan menyelesaikan ini,” kata Ketua Panja Didi Irawadi Syamsuddin usai rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Ia menyebut kesempatan melaksanakan rapat pada masa reses diambil setelah berbicara dengan pemerintah dan meminta persetujuan pimpinan. Politisi Fraksi Partai Demokrat ini



Ketua Panja RUU Hak Cipta Didi Irawadi Syamsuddin

menjamin walaupun pembahasan revisi RUU no.19 tahun 2002 ini dikebut, kualitas tetap menjadi perhatian.

Sementara itu anggota Panja RUU Hak Cipta dari FPAN Taslim menilai kemajuan pembahasan cukup signifikan.

Dalam dua kali rapat pada masa reses ini RUU usul inisiatif pemerintah telah menuntaskan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) nomor 262.

Panja juga menyepakati untuk segera bertemu kembali pada tanggal 11 Agustus yang akan datang, masih dalam masa reses. Ia meyakini kesewenang-wenangan yang terjadi pada banyak karya cipta di tanah air akan dapat dibereskan apabila UU ini dapat disahkan.

“UU ini ingin memberikan perlindungan bagi hak para pencipta, tidak ada lagi kesewenang-wenangan dalam mengambil karya orang lain seperti film, musik, dll. Siapapun yang melanggar akan dituntut, sanksi hukumnya akan lebih berat,” demikian Taslim.

(iky) foto:andri/parle/iw.

Marzuki : Saya Istirahat Dulu Tapi Nanti Kembali

Ketua DPR RI Marzuki Alie menyatakan akan meneruskan karirnya di bidang politik setelah tugasnya sebagai Ketua DPR periode 2009-2014 selesai pada awal Oktober nanti. Ia memaparkan politik telah menarik minatnya karena memberi peluang melakukan sesuatu untuk orang banyak.

“Politik itu menarik karena kita mempunyai banyak kesempatan berbuat untuk orang banyak, jutaan orang bisa kita bantu. Tapi sebelum berlanjut saya akan istirahat dulu 3-5 bulan setelah itu saya insya Allah akan kembali,” katanya saat menyampaikan sambutan dalam acara Buka Puasa dengan Wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Selama istirahat, ia mengaku akan kembali ke kampung halaman di Palembang, Sumsel untuk mengurus usaha ‘amal baik’-nya di bidang pendidikan. Politisi FPD ini tercatat sebagai pemilik dan pengurus yayasan yang mengelola universitas, sekolah unggulan dan pondok pesantren di kota yang terkenal dengan makanan khas empek-empek ini.

Pada bagian lain Marzuki menyampaikan rasa syukur dapat melaksanakan tugas sebagai Ketua DPR selama hampir lima tahun dengan baik. Ia menyebut tantangan dan



Ketua DPR RI Marzuki Alie

godaan sebagai pimpinan lembaga negara itu cukup berat sehingga sejumlah pejabat negara saat ini terjerat kasus pidana korupsi. “Saya insya Allah selesai dengan baik-baik, tidak ikut-ikutan di sekolahkan,” tuturnya.

Dalam kesempatan acara buka puasa bersama itu Marzuki hadir bersama istrinya Asmawati yang saat ini menjadi anggota DPD RI dari daerah pemilihan Sumatera Selatan. Dalam Pemilu Legislatif beberapa waktu lalu terpilih kembali sebagai senator untuk yang ketiga kalinya.

“Teman-teman wartawan yang biasa meliput di parle-

men periode nanti tidak bertemu lagi dengan saya, tapi dengan istri saya masih,” katanya disambut tepuk tangan wartawan.

Sementara itu dalam pidatonya Ketua Koordinator Wartawan Parlemen, Jaka Suryo menyebut banyak kemajuan terutama dalam pelayanan kepada wartawan dalam lima tahun terakhir. “Sebagian dari keberhasilan itu nanti akan terekam dalam sebuah buku yang akan segera kita luncurkan. Sedang dicetak, insya Allah jadi,” pungkask dia.

(iky) foto:andri/parle/iw.

Pemerintah Harus Berikan Solusi Akibat Pembatasan BBM Bersubsidi



Pemerintah, melalui Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah mengeluarkan surat edaran pada 24 Juli 2014 mengenai pengendalian bahan bakar minyak bersubsidi. Dalam surat itu disebutkan, larangan penjualan solar untuk wilayah Jakarta Pusat mulai 1 Agustus 2014.

Kebijakan ini menyusul penetapan kebijakan kuota tetap dalam APBN-Perubahan 2014. Kuota BBM bersubsidi hingga akhir tahun diturunkan dari 48 juta kiloliter menjadi 46 juta kiloliter. Pemerintah mengaku telah menyosialisasikan kebijakan ini kepada pihak yang berkepentingan.

“Pemerintah harus memberikan opsi lain, dengan menyediakan BBM jenis pertamax dan pertadex. Pemerintah harus menjamin tidak ada kelangkaan BBM non subsidi. Termasuk juga

untuk kebutuhan nelayan, yang setiap harinya menggunakan solar,” kata Ketua Komisi VII DPR RI Milton Pakpahan, saat ditemui Parle, Kamis (7/08).

Politisi Demokrat ini juga memastikan, untuk kebutuhan nelayan berbobot di bawah 30 Gross Ton (GT) tetap bisa mendapatkan BBM bersubsidi. Pasalnya, kapal berbobot kurang dari 30 GT biasanya hanya dimiliki oleh nelayan, sedangkan kapal berbobot lebih dari angka itu, dimiliki oleh industri penangkapan ikan atau pemodal besar.

“Saya harapkan kepada BPN dan Pertamina, agar nelayan di bawah 30 GT dilindungi dan tetap bisa mendapatkan BBM bersubsidi. Itu nelayan kita yang mencari nafkah, mereka yang menggunakan solar subsidi itu untuk bekerja,” tambah Milton.

Di satu sisi, Milton mendukung pembatasan BBM bersubsidi. Sehingga, hal ini tidak sampai mempengaruhi keuangan negara. Pasalnya, jika dipaksakan tetap menyuplai BBM bersubsidi sebanyak 48 juta kiloliter, dikhawatirkan APBN akan mengalami defisit. Sehingga DPR dan pemerintah sepakat untuk mengurangi BBM bersubsidi sebanyak 2 juta kiloliter.

“Kita harus mengambil keputusan. Pemerintah harus mengatasi supaya jangan over kuota, jadi pemerintah tidak nombok lagi, tidak dipotong lagi dari (anggaran) yang lain,” imbuh Milton.



Ketua Komisi VII DPR Milton Pakpahan

Diharapkan, dengan adanya pengurangan BBM bersubsidi ini, anggaran yang ada bisa dialokasikan ke bidang yang lebih membutuhkan, seperti infrastruktur. (sf) foto: iwan armanias/parle/iw.

DPR Kebut Pembahasan RUU PPHMHA

RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (PPHMHA) termasuk menjadi salah satu produk legislasi yang mendapat perhatian publik terutama masyarakat adat di seluruh tanah air. Panitia Khusus (Pansus) yang saat ini sedang membahasnya bersama pemerintah akan bekerja keras agar penyelesaian bisa tepat waktu.

“Kita akan mengejar target penyelesaian agar bisa tuntas pada masa sidang yang akan datang. Jadi pembahasannya kita kebut, pada reses pun kita sempat melakukan rapat,” kata Ketua Pansus RUU PPHMHA Himatull Alyah Setiawaty saat dihubungi di Jakarta, Kamis (7/8/14).

RUU yang merupakan usul inisiatif DPR ini sudah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah. Sejumlah masukan dari masyara-



Ketua Pansus RUU PPHMHA Himatull Alyah Setiawaty

kat, pakar dan pihak-pihak terkait lain juga sudah berhasil dihimpun.

Politisi FPD ini menyebut dalam masa reses ini pansus pernah mengagendakan rapat dengan Menteri Kehutanan tapi sayang waktu itu berhalangan hadir. Namun pembahasan tetap dilanjut-

kan dengan ahli dan narasumber lain. Ia menjelaskan segera setelah masa sidang dimulai kembali 16 Agustus yang akan datang Pansus akan segera melanjutkan pembahasan.

Salah satu isu utama dari RUU ini adalah pengakuan terhadap eksistensi hukum adat yang sudah ada sejak lama di Indonesia. Dalam kasus tertentu para pihak dapat memilih berperkara berdasarkan hukum adat yang telah diakui atau hukum nasional. Sejumlah fakta menunjukkan hukum adat lebih memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

“Prinsipnya nanti kita memberi ruang bagi pemberlakuan hukum adat dan jangan sampai ada warga negara diadili atas satu kesalahan yang sama dua kali,” pungkas Alyah. (iky) foto:andri/parle/iw.

Pemerintah Harus Evaluasi Layanan Angkutan Laut

Pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap layanan transportasi laut. Hal ini ditujukan agar angkutan laut tersebut dapat menjadi pilihan masyarakat sebagai moda transportasinya, khususnya saat mudik dan arus balik lebaran.

Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi V DPR RI, Arwani Thomafi kepada wartawan beberapa waktu lalu. Ditambahkan Politisi dari Fraksi PPP ini permasalahan pelayanan transportasi laut ini diantaranya terkait dengan infrastruktur di sejumlah pelabuhan yang kurang memadai.

“Di beberapa pelabuhan sering terjadi *over capacity* atau kelebihan kapasitas. Hal tersebut membuat antrian panjang kapal-kapal setempat, yang kemudian juga memperlambat proses bongkar muat kapal. Kondisi tersebut pada akhirnya membuat pelayanan di pelabuhan menjadi tidak maksimal,” jelas Thomafi.

Hal tersebut diungkapkan Thomafi akan mengurangi minat pengguna angkutan laut. Akibatnya masyarakat lebih memilih menggunakan transportasi darat. Padahal dikatakannya, Indonesia merupakan negara kepulauan, dimana sudah seharusnya angkutan laut menjadi transportasi utama, bukan malah sebagai transportasi alternatif seperti sekarang ini.

Oleh karena itu ia berharap agar pemerintah dapat



Anggota Komisi V DPR Arwani Thomafi bersama Tim Kunker Komisi V

segera mengevaluasi pelayanan transportasi lain, sehingga dapat membenahi infrastruktur yang kemudian akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian angkutan laut dapat menjadi transportasi andalan masyarakat terutama masyarakat daerah kepulauan. (ant) foto: iwan armanias/parle/iw.

Apresiasi Mudik Tapi Tetap Lakukan Evaluasi



Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama saat memimpin kunjungan ke Kota Baubau

Ketua Komisi V DPR RI, Laurens Bahang Dama mengapresiasi kinerja pemerintah serta lembaga-lembaga terkait pelaksanaan mudik 2014 yang menurutnya berjalan baik dan aman. Hal tersebut diungkapkannya kepada wartawan beberapa waktu yang lalu.

“Saya melihat mudik 2014 berlangsung baik, aman. Saya apresiasi pemer-

intah, lembaga-lembaga terkait yang telah membantu terlaksananya Mudik 2014,” kata Laurens di Gedung DPR RI, Jakarta.

Laurens menjelaskan beberapa bukti yang ia lihat dari pelaksanaan mudik tahun ini, diantaranya jumlah kecelakaan, baik kendaraan roda dua maupun roda empat yang menurun

drastis dibanding tahun lalu. Meski demikian ia mengatakan masih ada sejumlah kekurangan dalam mudik tahun ini. Hal tersebut berkenaan dengan kondisi infrastruktur di jalur mudik yang diakuinya juga mengganggu kelancaran mudik.

“Meski dikatakan baik, namun dalam pelaksanaan mudik tahun ini tetap masih terjadi sejumlah kekurangan, salah satunya yang cukup mengganggu adalah kondisi infrastruktur jalur mudik yang rusak. Hal itu sedikit banyak mengganggu kelancaran mudik,” ungkap Politisi dari Fraksi PAN ini.

Diungkapkannya, walau secara kasat mata pelaksanaan mudik 2014 berjalan baik, namun dari berbagai kekurangan yang terjadi, komisinya berjanji akan tetap melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan mudik 2014 ini.

“Kami (Komisi V DPR) akan mengundang mitra kerja untuk mengevaluasi pelaksanaan mudik. terutama evaluasi berkenaan dengan Infrastruktur serta koordinasi dengan instansi terkait,” tegasnya. (ant) foto: iwan armanias/parle/iw.

DPR Dukung Penghapusan BBM bersubsidi di Jalan Tol

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Achmad Farihal, mendukung kebijakan pemerintah yang menghapus bahan bakar minyak (BBM) bensin bersubsidi di sepanjang jalan tol, baik di Jakarta maupun luar Jakarta.

“Dengan dihapusnya BBM jenis premium yang berada sepanjang jalan tol, saya sangat setuju dan mendukung kebijakan itu. Orang yang melewati jalan tol, adalah orang yang sudah di atas kemampuan karena punya kendaraan sendiri,” kata Farihal, kepada Parlemen, beberapa waktu lalu, saat men-

gunjungi Terminal BBM, Padalarang.

Alasan lain, kata Farihal, penghapusan BBM jenis premium tersebut juga untuk mengurangi subsidi bagi asing.

“Di Jakarta ada perwakilan negara asing, perwakilan perusahaan asing, perusahaan nasional yang rata-rata menyewa mobil. Mereka hampir semua menggunakan BBM jenis premium, apakah kita harus mensubsidi direksi-direksi perusahaan asing, perwakilan asing atau perusahaan nasional yang besar-besar. Jadi saya setuju untuk

beberapa kawasan di Jakarta premium dibatasi. Saya tidak setuju premium dihapus untuk kendaraan roda dua dan umum untuk saat ini sampai ada moda transportasi yang layak,” kata politisi F-PPP itu.

Berbagai pengurangan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dilakukan oleh pemerintah, setelah DPR dan Pemerintah sepakat memangkas kuota BBM subsidi sebesar 2 juta kiloliter, dari 48 juta kiloliter menjadi 46 juta kiloliter.



Wakil Ketua Komisi VII DPR Achmad Farial saat memimpin kunjungan ke Padalarang

Program pengurangan tersebut, dimulai sejak awal bulan lalu, mulai penghilangan solar subsidi di Jakarta Pusat, penjadwalan penyaluran solar subsidi di wilayah tertentu, pengurangan kuota solar buat nelayan dengan kapal besar, dan hanya berselang hitungan hari, kini, masyarakat pengguna jalan tol tidak akan menemukan bensin jenis premium di sepanjang jalan tol.

Sampai akhir Juli 2014, Pertamina melansir realisasi konsumsi solar ber-

subsidi sudah mencapai 9,12 kiloliter atau sekitar 60 persen dari total kuota APBNP-2014 yang dialokasikan kepada PT Pertamina (Persero) sebesar 15,16 juta kiloliter. Sedangkan realisasi konsumsi premium bersubsidi mencapai 17,08 juta kiloliter atau 58 persen dari kuota APBNP-2014, sebesar 29,29 juta kiloliter.

Achmad Farial mendukung keputusan BPH Migas dan Pertamina yang membatasi penjualan BBM subsidi tersebut. Menurut dia, pembatasan itu

diperlukan untuk menjaga konsumsi BBM subsidi tidak lebih dari 46 juta kilo liter pada tahun ini.

Dia menilai, pembatasan penjualan BBM subsidi juga untuk mengurangi beban negara di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN 2014, negara mengalokasikan dana sebesar 280 triliun untuk subsidi energi.

“Yang dibatasi itu kan SPBU di jalan tol, logikanya kalau masyarakat sudah bisa membeli mobil dan bayar tol artinya mereka sudah mampu dan tidak perlu disubsidi lagi. Jadi pembatasan penjualan BBM subsidi di SPBU jalan tol dan juga solar merupakan langkah awal untuk menjaga konsumsi BBM subsidi tidak melebihi kuota,” kata Farial.

Farial mengatakan, konsumsi BBM subsidi akan terus meningkat seiring dengan naiknya penjualan motor dan mobil. Kata dia, setiap tahun industri otomotif menjual 7 juta unit motor dan 1 juta unit mobil.

“Dengan bertambahnya jumlah motor dan mobil, maka konsumsi BBM akan terus meningkat” tegasnya. (as) foto:agung/parle/iw.

Masa Jabatan Busyro Pantas Diperpanjang

Anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari meminta pemerintah mempertimbangkan untuk memperpanjang masa jabatan Wakil Ketua KPK Busyro Muqodas yang akan berakhir 10 Desember nanti. Pilihan ini atas dasar efisiensi anggaran dan kinerja Busyro yang dinilai cukup baik.

“Saya setuju kalau Pak Busyro kita dorong untuk meneruskan masa jabatannya dengan pertimbangan kinerjanya bagus. Jadi ini pertimbangannya bukan sekedar pertimbangan efisiensi, penghematan semata tetapi karena kandidat ini pantas diperpanjang,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (8/8/14).

Dengan perpanjangan itu berarti pemerintah tidak perlu membentuk panitia seleksi dan masa kerja pimpinan KPK bisa berakhir bersamaan pada Desember 2015 nanti. Namun Politisi FPDIP ini menekankan pilihan efisiensi ini tidak dapat dijadikan preferensi kebijakan selanjutnya karena prestasi



Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari

kandidat tetap harus jadi pertimbangan.

Bicara pada kesempatan berbeda anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan kondisi negara yang sedang dalam proses transisi pasca pemilu. Hal ini menurutnya bisa saja mempengaruhi obyektivitas dalam penentuan kandidat.

“Masa bakti Menkumham akan selesai Oktober 2014. Publik bisa saja menafsirkan sebagai ‘aji mumpung’, pemerintahan akan berakhir lebih baik menanamkan orang kita di KPK,” tuturnya.

Ia juga menggambarkan proses transisi yang juga sedang berlangsung di Senayan. Bisa dipastikan anggota DPR periode ini tidak akan sempat melakukan proses uji kepututan

dan kelayakan karena sudah memasuki masa purna bakti. Memperhatikan fakta ini ia mengusulkan dua opsi yang bisa diambil pemerintah.

Pilihan pertama menurutnya, memperpanjang masa jabatan Busyro Muqqudas hingga Desember 2015 atau pilihan lain mengosongkan kursi ini sampai masa tugas seluruh pimpinan KPK berakhir. “Selanjutnya pemilihan pimpinan KPK hanya sekali dalam satu periode,” ujar dia.

Seperti diketahui Busyro Muqqudas mendapat amanah sebagai anggota KPK menggantikan Antasari Azhar yang terpaksa berhenti ditengah masa jabatan karena tersangkut kasus pidana. Kondisi ini membuat masa tugasnya berbeda dengan 4 pimpinan KPK lainnya. *(iky)/foto:iwan armanias/parle/iw.*

DPR Netral Demi Demokrasi Bermartabat

Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunanjar Sudarsa menegaskan bahwa DPR dalam hal ini komisi yang dipimpinnya bersikap netral terhadap penyelenggaraan Pemilu Presiden RI. Hal tersebut semata untuk menegakkan demokrasi yang bermartabat.

“Komisi II memilih sikap tidak memihak kepada salah satu pasangan capres-cawapres. Oleh karenanya kami akan selalu mengawasi proses pelaksanaan Pemilu di Indonesia, demi membangun demokrasi yang bermartabat secara jujur dan fair sehingga bisa diterima oleh semua pihak,” kata Agun ketika menerima perwakilan tim kampanye nasional dan tim relawan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Gedung DPR Jakarta, Rabu (6/8).

Walau begitu ditambahkannya, Komisi II tidak bisa seenaknya dengan memanggil KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, apalagi berupaya untuk mendikhtenya. Hal tersebut dikarenakan DPR RI dan penyelenggara pemilu memiliki hak dan kewenangan masing-masing yang semuanya diatur oleh konstitusi dan aturan perundangan.



Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar berjabat tangan dengan Kivlan Zein

Politisi Partai Golkar ini menegaskan bahwa gugatan pasangan capres-cawapres nomor satu ke Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan hak konstitusional yang diatur dalam UU No 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden, sehingga hal tersebut menjadi sesuatu yang wajar.

“Saya berharap MK dapat menyelesaikan gugatan sengketa pemilu presiden ini dengan sebaik mungkin. Dan setelah MK membuat keputusan, siapapun pasangan capres-cawapres yang terpilih sebagai pemenang pemilu presiden adalah pasangan yang legitimate, sehingga harus bisa diterima oleh semua pihak,” katanya sambil berharap gerakan politik yang tengah dilakukan tim kampanye dan tim relawan Capres Prabowo-Hatta semata-mata untuk menegakkan demokrasi yang bermartabat.

(Ant) foto:andri/parle/iw.



DPR RI Jadi Role Model Parlemen Afghanistan



Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti menerima Delegasi Setjen Wolesi Jirga National Assembly of Afghanistan

DPR RI khususnya Kesetjenan DPR menjadi *role model* atau contoh bagi Parlemen Afghanistan. Hal tersebut ditandai dengan kedatangan delegasi Setjen Wolesi Jirga National Assembly of Afghanistan ke DPR RI untuk yang ketiga kalinya, Selasa (5/8).

Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti menyambut baik keinginan Parlemen Afghanistan untuk belajar banyak tentang demokrasi, proses yang dilalui Indonesia dalam menghasilkan sebuah kebijakan atau undang-undang, serta bagaimana Setjen DPR RI memberikan dukungan terhadap Parlemennya. Hal tersebut mengingat beberapa waktu yang lalu Afghanistan baru saja melalui sebuah proses pemilihan umum dan baru terbentuk pemerintahan yang baru.

“Hubungan persahabatan Indonesia dengan Afghanistan seyogyanya sudah sejak lama, bahkan tahun 1961 Presiden Soekarno pernah berkunjung dan berpidato di sebuah lapangan di Afghanistan. Dan untuk keparlemenan

Afghanistan sendiri, kunjungannya kali ini ke Indonesia sudah yang ketiga kalinya. Tujuannya selain untuk terus menjalin persahabatan, Parlemen Afghanistan juga ingin belajar banyak dari Indonesia, tentang proses yang dilalui Indonesia untuk menghasilkan sebuah kebijakan atau Undang-undang. Afghanistan juga ingin mengetahui bagaimana Setjen DPR RI memberikan dukungan terhadap parlemen atau kedewanan,” kata Winantuningtyastiti.

Afghanistan menilai Indonesia sebagai negara maju dan negara besar yang masuk dalam sepuluh besar negara dengan perekonomian terbesar di dunia cukup mampu mengawal proses demokrasi. Oleh karenanya mereka ingin mencontoh apa yang sudah dilakukan Indonesia, dalam hal ini Kesetjenan DPR RI.

Dikatakan Win, sebelumnya Afghanistan pernah belajar tentang demokrasi dan proses berbangsa pada beberapa negara di Eropa, namun pihak Eropa malah menyarankan

agar negara yang setiap 19 Agustus itu merayakan hari kemerdekaannya itu untuk belajar pada Indonesia. Hal tersebut merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi Indonesia dipercaya menjadi contoh nyata negeri yang sukses mengawal demokrasi pasca reformasi beberapa tahun lalu.

Disisi lain, menurut Win, Indonesia juga dapat mengambil hikmah atau manfaat dari kedatangan dan kerjasamanya dengan Afghanistan, salah satunya lewat keaktifan Afghanistan di beberapa organisasi internasional. Karena, meski parlemen Afghanistan masih tergolong baru terbentuk, namun Afghanistan aktif di berbagai organisasi dunia, khususnya organisasi parlemen internasional. Hal tersebut cukup menguntungkan Indonesia, terutama ketika di berbagai kesempatan Indonesia mengajukan suatu resolusi, dan karena persahabatan yang dibangun selama ini tak jarang Afghanistan memberikan dukungan penuh terhadap resolusi tersebut. (Ayu)/foto:odjiele/parle/iw.



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti menerima Delegasi Setjen Wolesi Jirga National Assembly of Afghanistan, Selasa (5/8). Foto: Naefurojje/Parle/lw.



Delegasi Setjen Wolesi Jirga National Assembly of Afghanistan mengunjungi Bagian Pemberitaan Setjen DPR RI diterima Kabag Pemberitaan Dadang Prayitna, Jumat (8/8) Foto: Eka Hindra/Parle.



Tim Kunker Komisi II DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi Arif Wibowo mengadakan pertemuan dengan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terkait Pileg dan Pilpres, Rabu (6/8) Foto: Eka Hindra/Parle.